



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN

dalam Pengawasan
Perbankan di Indonesia

Muhammad Saleh | Baso Madiong | Abd. Haris Hamid



Penerbit
Pusaka Almaida

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA**

Copyright@Penulis 2022

Penulis:

**Muhammad Saleh
Baso Madiung
Abd. Haris Hamid**

Editor:

**Almusawir
Yulia A. Hasan**

Tata Letak
Mutmainnah

vi + 108 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-333-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul "**Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Di Indonesia**". Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implemintasi akademik.

Pengawasan yang dilakukan OJK belum efektif, tidak mampu mengalami peningkatan karena hanya mengandalkan pola pemantauan dan pengawasan melalui sistem yang terintegrasi, diperlukan tenaga profesional yang berintegritas untuk secara berkala melakukan pemeriksaan langsung Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan aktivitas perbankan antara lain: (1) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang handal dalam bidang pemeriksaan langsung lembaga keuangan perbankan; (2) Pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan itu dilakukan secara kolektif dan nasional; dan (3) Infrastruktur data dari lembaga pengawas sebelumnya ada namun tidak dapat diandalkan oleh OJK.

Sebagai lembaga negara yang independen dan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dapat mempengaruhi independensi, rentan terganggu oleh gejolak politis. OJK perlu peningkatan skill tenaga profesional dalam hal integritas. Serta perlunya persiapan internal secara organisasi dan infrastruktur pendukung untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Disamping penguatan sistem pengawasan secara terpadu yang dilakukan, OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan harus mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi dalam bidang hukum dan ekonomi.

Diharapkan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap pelayanan dan pengaduan masyarakat semakin preventif, dengan adanya lembaga pengawas yang terintegrasi dan kedepannya Otoritas Jasa Keuangan ini lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi yang luas sehingga eksistensi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang baru didirikan dapat diketahui oleh kalangan masyarakat umum baik secara struktur, fungsi dan peranan sehingga Otoritas Jasa Keuangan bisa lebih dikenali secara luas bukan hanya pada kalangan tertentu saja.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru masih butuh pada penyesuaian terhadap kinerja lembaga ini, independensi dan profesionalitas Otoritas Jasa Keuangan harus bersifat konsisten. Pengisian keanggotaan Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, hendaknya tidak menjadi perpanjangan tangan dari pihak lain melainkan dijadikan pertukaran informasi menjadi lebih efisien dan tertib.

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TEORI EFEKTIVITAS DAN SISTEM PENGAWASAN DALAM HUKUM	7
A. Teori Efektivitas Hukum	7
B. Teori Pengawasan	11
C. Teori Sistem Dalam Hukum	14
BAB III SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA	17
A. Peran Lembaga Keuangan	17
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	22
C. Bank Indonesia (BI)	37
D. Sistem Perbankan Nasional	46
BAB IV PROFIL OTORITAS JASA KEUANGAN	61
A. Wilayah Kerja OJK Regional 6 Sulampua	61
B. Visi dan Misi	62
C. Struktur Organisasi	63
D. Tata Kelola OJK	66
E. Data Kepegawaian OJK	73

BAB V	KAJIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JA SA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN DI KOTA MAKASSAR	75
A.	Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan	75
B.	Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Aktivitas Perbankan	93
BAB VI	PENUTUP	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105